



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 326 /KEP/BPP/2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada publik, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu didukung dengan data, dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu ditetapkan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, daftar informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, serta daftar informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2017:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

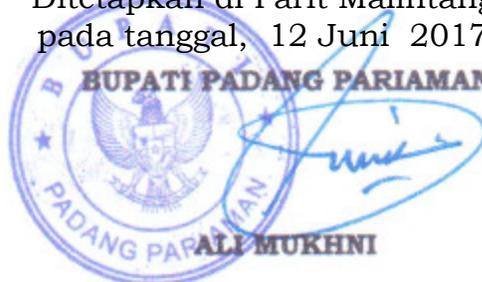
16. Undang-Undang .....

16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, kegiatan Pusat Pelayanan Informasi Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal, 12 Juni 2017



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 326 /KEP/BPP/2017  
 TANGGAL 12 Juni 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN  
 2017

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
<b>1</b>	<b>Informasi tentang Propil Badan Publik.</b>	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	-
1	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
2	Ruang lingkup kegiatan	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
3	Visi dan misi	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
4	Maksud dan tujuan	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
5	Struktur organisasi	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
6	Gambaran umum setiap satuan kerja Perangkat Daerah	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
7	Profil singkat pejabat struktural	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	a Nama;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	

	b Nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	c Alamat unit/satuan kerja pejabat	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	d Laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan ;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	e Latar belakang pendidikan	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	f Penghargaan yang pernah diterima	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
<b>2</b>	<b>Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik</b>	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	1 Nama program dan kegiatan;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	2 Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor Telepon dan atau alamat yang dapat di hubungi	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	3 Target dan/atau capaian program serta kegiatan	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	4 Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	5 Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan dokumen anggaran lainnya	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	6 Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	

	Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan dokumen anggaran lainnya	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
7	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik misalnya : proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan, agenda dan proses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), waktu distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agenda sidang pada tiap tingkatan peradilan.	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
8	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
3	<b>Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik Negara, meliputi</b>	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	

	1 Pengumuman penerimaan pegawai dilingkungan Badan Publik;	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	2 Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai dilingkungan Badan Publik	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	3 Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan Pegawai	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	4 Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasi;	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	5 Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	6 Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yang diterima.	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	7 Hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan pegawai yang diikutinya	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
<b>4</b>	<b><i>Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan untuk umum, Informasi tentang penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan, sekurang-kurangnya meliputi:</i></b>	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	1 Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasi;	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	2 Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	3 Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam Setiap lembaga pendidikan;	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	4 Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	

	5	Jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	6	Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	7	Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang diterima	BKPSDM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
<b>5</b>		<b>Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya yang sekurang-kurangnya berisi:</b>	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	1	Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	2	Efisiensi dana yang dicapai;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	3	Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	4	Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	5	Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	

	6	Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	7	Data statistik tentang kegiatan bila ada	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
<b>6</b>	<b>Ringkasan Laporan keuangan yang sekurang kurangnya terdiri atas :</b>		OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	1	Neraca dan laporan realisasi Anggaran	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	2	Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	3	Daftar Aset dan Investasi	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
<b>7</b>	<b>Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik yang sekurang kurangnya terdiri atas :</b>		PPID/DINAS KOMINFO	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	1	Jumlah Permintaan informasi yang diterima	PPID/DINAS KOMINFO	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan informasi	PPID/DINAS KOMINFO	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	3	Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak.	PPID/DINAS KOMINFO	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	4	Alasan penolakan informasi	PPID/DINAS KOMINFO	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
<b>8</b>	<b>Informasi tentang Peraturan dan atau Keputusan yang mengikat Publik yang</b>		BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	1	Daftar Rancangan dan tahap perumusan bagi Peraturan Keputusan dan atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan	BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	

	2	Daftar Dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan	BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
	3	Daftar Peraturan Keputusan dan atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
<b>9</b>		<b><i>Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi serta tata cara menyelesaikan sengketa Informasi</i></b>	PPID/DINAS KOMINFO	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
<b>10</b>		<b><i>Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan</i></b>	PPID/DINAS KOMINFO	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
<b>11</b>		<b><i>Informasi tentang prosedur Peringatan Dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di</i></b>	BPBD	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	
<b>12</b>		<b><i>Informasi tentang pengumuman pengadaan barang /jasa SKPD</i></b>	LPSE/BAGIAN PBJ	2017	√		√	Sepanjang masih berlaku	-



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 326 /KEP/BPP/2017  
 TANGGAL 12 Juni 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 TAHUN 2017

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIK ASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Informasi tentang Perda, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Kepala SKPD dan Kebijakan SKPD sekurang kurangnya terdiri atas :	OPD PADANG PARIAMAN /BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
1	Dokumen pendukung seperti Naskah Akademis, kajian, atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan keputusan dan kebijakan tersebut.	OPD PADANG PARIAMAN /BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
2	Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan keputusan atau kajian tersebut.	OPD PADANG PARIAMAN /BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
3	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan keputusan atau kebijakan tersebut.	OPD PADANG PARIAMAN /BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
4	Rancangan peraturan keputusan atau kebijakan tersebut	OPD PADANG PARIAMAN /BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
5	Tahapan perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut	OPD PADANG PARIAMAN /BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
6	Daftar Peraturan, keputusan, kebijakan yang telah diterbitkan	OPD PADANG PARIAMAN /BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Selama masih berlaku	-

	7	Seluruh informasi lengkap yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;	OPD PADANG PARIAMAN /BAGIAN HUKUM	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
2		Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	1	Pedoman pengelolaan administrasi, personil, dan keuangan.	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	2	Profil Lengkap Pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima.	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	3	Anggaran badan Publik secara umum maupun secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	4	Data statistik yang dibuat oleh badan publik	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	3	Surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tupoksinya	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	4	Informasi tentang perjanjian dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	5	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan, dan atau tidak dikeluarkan, berikut dokumen	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	6	Informasi tentang Juklak/Juknis, Buku Pedoman, data SKPD, SPM, SOP dan ISO.	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	7	Informasi tentang kajian, Naskah Akademis dan sejenisnya yang buat oleh SKPD	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	8	Data perbendaharaan atau inventarisasi	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
	9	Rencana Strategis dan rencana kerja Badan Publik	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-

10	Agenda kerja pimpinan Badan Publik	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
11	Informasi mengenai kegiatan layanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
12	Informasi Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
13	Informasi Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
14	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
15	Daftar informasi publik lainnya yang dinyatakan terbuka berdasarkan undang-undang	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-
16	Aplikasi e-Government	OPD PADANG PARIAMAN	2017	√		√	Selama masih berlaku	-



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 326 /KEP/BPP/2017  
 TANGGAL 12 Juni 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA								
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFIKASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Ancaman keamanan kesehatan masyarakat.	OPD Padang Pariaman	2017	√			Selama berlaku	-
2	Ancaman Ketertiban umum	OPD Padang Pariaman	2017	√			Selama berlaku	-
3	Ancaman bencana Alam	OPD Padang Pariaman	2017	√			Selama berlaku	-
4	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan	OPD Padang Pariaman	2017	√			Selama berlaku	-
5	Informasi karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;	OPD Padang Pariaman	2017	√			Selama berlaku	-

6	Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;	OPD Padang Pariaman	2017	√			Selama berlaku	-
7	Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;	OPD Padang Pariaman	2017	√			Selama berlaku	-
8	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;	OPD Padang Pariaman	2017	√			Selama berlaku	-
9	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.	OPD Padang Pariaman	2017	√			Selama berlaku	-



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 326 /KEP/BPP/2017

TANGGAL 12 Juni 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

**DAFTAR INFOMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO		KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
		<b>KEARSIPAN</b>				
1		Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j ;UU No.43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h ;	Sampai ada Persetujuan dari orang yang bersangkutan /pihak yang berwenang	Mengungkap Rahasia Pribadi	Melindungi data Pribadi
2		Arsip Peta Foto Udara	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d ; UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf d	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap Kekayaan Alam dan rahasia negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan

3		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I ; UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 Huruf i	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
4		Arsip Dinamis; aktif dan inaktif, yang berisikan :				
	a	Dokumen Keuangan, SPJ berikut lampirannya Dokument anggaran dan otorisasinya	UU.No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data Lengkap yang terlindungi Dalam proses penegakan hukum
	b	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/peporangan	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	Selama masih berlangsung penyelenggaraanya	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan Intelektual	Melindungi hak atas Kekayaan intelektual
	c	Data Informasi pertahanan dan keamanan negara	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	Selama status Perlindungan Masih berlaku	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi Pertahanan dan keamanan negara
	d	Data kekayaan alam yang dilindungi	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	Pengukapan penguasaan atas sumber dungikekayaan alam yang dilindungi	Melindungi kekayaan alam yang dilindungi
	e	Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri ketahanan ekonomi	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi dan dapat meresahkan masyarakat	melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masvarakat

	f.	Akta otentik yang bersifat Pribadi dan wasiat	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	melindungi kepentingan kepemilikan Pribadi
	g.	Memorandum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	UU.No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 tahun ayat (1) dan (2)	selama masih berlaku	mengganggu proses Pelaksanaan Kegiatan	melancarkan proses Pelaksanaan Kegiatan
5		Disposisi surat pimpinan	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	selama belum ada tindak lanjut dari SKPD Pengelola Surat	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan	mengamankan proses Penyusunan Kegiatan
		<b>BIDANG KEPENDUDUKAN</b>				
6		Data Pribadi Penduduk	UU No. 14 tahun 2008, pasal 17 huruf a dan huruf I, UU no. 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2), dan (3)	Sampai dengan terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/bupati/Walikota/tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
		<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>				
7		Rincian hasil Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
8		Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan peserta diklat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia Pribadi seorang PNS
9		Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/ pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia Pribadi seorang PNS

10	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan di ungkap rahasianya	mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
11	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan di ungkap rahasianya	mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
12	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	sampai ada keputusan tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Memperlancar proses penegakan hukum, Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
13	Data Rencana Penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Dokumen Hasil Sidang Baperjakat (notulen pertimbangan/ rekomendasi daftar nominasi/ rangking Pejabat Struktural	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan

15	Dokumen pengakatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara	mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	SK Pengakatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai Berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan karena adanya Pengukapan secara Prematur	penyusunan kebijakan
17	Daftar Penjabat yang akan Dilantik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai Berlakunya SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan menghambat kesuksesan, Kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18	Intrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses ten potensi/kompetensi PNS/pejabat	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
19	Hasil Identifikasi potensi PNS	UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Tahun i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan, dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Mengamankan proses penyusunan kebijakan, melindungi rahasia pribadi seorang PNS

20	Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21	Soal Tes CPNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	sampai selesai pelaksanaan tes	dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
22	Data Nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan pengumuman	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	melindungi rahasia pribadi seorang PNS, Mengamankan proses penyusunan kebijakan
23	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
24	Dokumen pengakatan, pemindahan guru PNS Dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU.No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	SK pengakatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan

26		Daftar nilai DP3 PNS	UU. No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
27		Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	UU. No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
28		Keputusan ijin/keterangan tentang pencerain PNS	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
29		Dokumen pengelolaan kepegawain:(Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, Pensiun, dan administrasi kepegawain)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS Yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		<b>BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN</b>				
30		Kegiatan Intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan kemandirian negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)

31	Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan
	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
32	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	membantu kelancaran proses penegakan hukum
33	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
34	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
	<b>BIDANG PEREKONOMIAN</b>				
35	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat(3)huruf b, KIP, Pasal 6 ayat(3)huruf b	sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan

36	Rencana Alokasi bersubsidi	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat(3)huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat mengamankan proses penyusunan kebijakan
37	Rencana Alokasi Dana Talangan untuk kabupaten	UU No. Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur	dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan
	<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>				
38	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	sampai dengan selesainya proses pelepasan tanah Kas Desa	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan
39	Kajian teknis penetapan lokasi dan basic Design Pengadaan dan basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	sampai terbitnya SP2LP (surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan)	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	ekonomi nasional mengamankan proses penyusunan kebijakan

40	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dapat menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	melindungi ketahanan ekonomi nasional Mengamankan proses penyusunan kebijakan
41	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	kelancaran proses tukar menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
42	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengakatan kepala/wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai penerbitan keputusan	dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
43	Keputusan Medagri tentang peresmian Pemberhentian dan pengakatan kepala/wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf	sampai dengan Penyerahan SK	Penyerahan SK dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
44	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Sumbar tentang Peresmian Pemberhentian dan peresmian pengakatan pengganti antar waktu anggota/Pimpinan DPRD Padang Pariaman	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	sampai dengan penerbitan keputusan	dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan

45.	Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari	UU No. 14 Tentang 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan pengecualianya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
46	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon Wali Nagari	UU No. 14 tentang 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i	Selama diperlukan pengecualianya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	<b>BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI</b>				
47	Berita sandi	UU No 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
49	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
51	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
52	Jalur Komonikasi VVIP	UU No. 14 Th 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

53	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
54	Berita/Radiogram rahasia	UU No. Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
	<b>BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>				
55	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b	selama masih berlaku	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang baik sehat
56	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang( Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, kualitas Bahan Tambang, sebaran)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat(3) huruf b dan 17 huruf b daan d	Sampai dengan terpilihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mengukapkan kekayaan alam	melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
57	Data Teknis Potensi Air Tanah	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama potensi air tanah diperkirakan	Dapat mengukapkan kekayaan alam	mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
	<b>PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				
58	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, dll	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
59	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara

60		Hasil Test kemampuan fisik	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil test kemampuan fisik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
61		Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	melindungi hak atas kekayaan intelektual
		<b>BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</b>				
62		Dokumen Perijinan beserta lampirannya	UU No Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Selama dokument masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	melindungi data perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia
63		Catatan Penilaian Review Terhadap Riset Unggulan Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
64		Data Debitur dana bergulir	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	melindungi rahasia pribadi debitur
65		Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	UU No. 14 Pasal 17 huruf b	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan

66	Surat keterangan Asal(SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor(API) dan dokument lainnya di bidang perdagangan luar negeri	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
	<b>BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</b>				
67	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	UU No. Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama diperakan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (kordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara
68	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal loging/illegal trading yang masih dalam proses	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai dengan proses P21	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
69	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk publik	dapat mengukapkan kekayaan alam indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	melindungi/menjaga kekayaan alam indonesia (sumber daya plasma nutfah)

70		Proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
71		Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	UU No. 31 th 2004 tentang Perikanan UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d dan j UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber daya	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kekayaan alam
72		Hasil Uji Laboratorium untuk keperluan ekspor	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji ) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
73		Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengukapan secara prematur
		<b>BIDANG KESEHATAN</b>				
74		Identitas Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadis seseorang

75	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 47 ayat(2), UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
76	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU No. 14 th 2008 tentang UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i, UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1)	sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	melindungi rahasia pribadi pasien
77	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i, UU No. 36 th 2009 tentang kesehatan pasal 44 ayat (3)	Samapi ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	melindungi rahasia pribadi pasien
78	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf c, UU No. 14 th 2008 tentang KIP, PASAL 6(3)HURUF D, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
79	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	UU No 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

80	Hasil audit terkait dengan medical error	UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, pasal 9 ayat(2) dan pasal 74 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat(3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
81	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau sejenis	UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 33 dan 34, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 14, UU No. 36 th 2009 tentang Kesehatan, pasal 98 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
	<b>BIDANG SOSIAL, KETENAGA KERJAAN &amp; PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
82	Identitas Korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (jayandu) Widuri	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak pribadi
83	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pedampingan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi(riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik & psikis seseorang	menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitas

84	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai penerbitan keputusan	menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan
85	Hasil diagnosa/bedah kasus calon kelayan(penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	melindungi rahasia pribadi calon kelayan
86	Data kelayan UPT(Penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitas/penanganan kelayan)	melindungi rahasia pribadi kelayan
87	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengukapan	Mengamankan proses penyusunan
88	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada gubernur	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penanggung upah minimum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengupan secara prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan

89		Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan (nota pemeriksaan dan BAP)	Pasal 5 UU No. 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang pengawasan perburuhan tahun 1948 NR 23 dari republik Indonesia untuk seluruh indonesia, UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha
		<b>BIDANG KOMINFO</b>				
90		Lokasi server	UU No. 11 th 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual melindungi/ mengamankan perangkat serta data
91		Internet Protocol/IP Adress private	UU No. 11 th 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	melindungi hak atas kekayaan intelektual menjaga/melindungi hak akses
92		Bandwith Management	UU No. 11 th 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, pasal 25 UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwith di luar ketentuan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual mengatur kestabilan penggunaan bandwith

93		Sistem Manajemen Database	UU No. 14 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik, pasal 25 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama masih digunakan/ berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual, Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Melindungi hak atas kekayaan intelektual menjaga keamanan jaringan komputer
		<b>BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA</b>				
94		Rencana penertiban/penindakan dan penegakan pada objek tertentu	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesai dilaksanakan	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
95		Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai dengan selesainya proses penanganan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)

96	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	Sampai selesainya kasus	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	(memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi
97	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan		memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (personel dapat
98	Berita Acara Pemeriksaan	UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, dan i	Selama proses pemeriksaan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dapat mengungkap rahasia pribadi objek diperiksa, Dapat menghambat proses kesuksesan proses penyusunan kebijakan	memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan Melindungi data-data pribadi objek diperiksa
99	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	UU No. 5 th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 1981, Pasal 70 ayat (2), UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	1 tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum

	<b>BIDANG KEUANGAN</b>				
100	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindahtanganan barang daerah	UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
101	Database Objek Pajak dan Retribusi	UU No. 11 th 2008 tentang ITE Pasal 40, UU No. 14 th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan data base objek pajak dan retribusi
102	Dokument Proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan dan etika pengadaan
103	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
104	Dokumen penawaran dari Penyedia barang/jasa	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran
105	Susunan Kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokument

106	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi rahasia (data kekayaan)pribadi
107	Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	UU No. 17 th 2003 tentang keuangan negara, pasal 31 ayat(1) UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan
108	Kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

